

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM ALOKASI DANA

Oni Nugrianti dan Zulkarnaini

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract:** Through Community Empowerment Program Allocation. The purpose of this study is to investigate and analyze the factors that influence the empowerment of rural communities through village fund allocation (ADD) in District Central Kuantan Kuantan District Singingi. This research was conducted in the Central District of Kuantan Kuantan District Singingi, where the informant is research officer involved in the ADD program, community leaders and prominent scholars who know the ADD program. Data collected by interview and observation techniques, after the data was collected and then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results show the effectiveness of community empowerment through ADD program in District Central Kuantan Kuantan District Singingi still not running smoothly or less effective, while the dominant factor influencing factor is fear.

**Abstrak:** Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi Dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa melalui alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana yang menjadi informan penelitian adalah aparat yang terlibat dalam program ADD, tokoh masyarakat dan tokoh cerdik pandai yang mengetahui program ADD. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan lancar atau kurang efektif, sedangkan faktor yang dominan mempengaruhinya adalah faktor ketakutan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, pemberdayaan masyarakat, dan Program Alokasi Dana Desa (ADD).

## PENDAHULUAN

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang “*pro poor*” dengan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparat pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian ADD adalah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif.

Pelaksanaan Program ADD di Kabupaten Kuantan Singingi sudah disalurkan untuk semua

desa melalui kecamatan, dimana penyaluran berdasarkan bentuk alokasi dana, yaitu tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD), penunjang kegiatan pemerintahan kelurahan/desa (PKPKD) dan pembangunan infrastruktur desa (PID). Lembaga lokal di tingkat desa yang merupakan pelaksana program ADD adalah kantor desa yang kemudian akan dibantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) atau sebutan lainnya.

Penyaluran ADD sudah merata di setiap kecamatan, yang besarnya disesuaikan dengan jumlah kelurahan atau desa yang dimiliki oleh kecamatan. Penyaluran dana terbesar dilakukan pada Kecamatan Kuantan Mudik yaitu sebesar Rp. 4.632.350.000,- Hal ini disebabkan oleh banyaknya desa dan kelurahan yang dimiliki oleh kecamatan tersebut. Sementara penyaluran terbesar bagi kecamatan yang tidak memiliki

kelurahan dilakukan pada Kecamatan Logas Tanah Darat yaitu sebesar Rp. 2.068.300.000,- yang memiliki 13 desa. Kemudian penyaluran yang bermasalah, terutama pada dana pembangunan infrastruktur desa (PID) yaitu ada pada Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai dan Kecamatan Pangean.

Permasalahan yang dihadapi oleh ketiga kecamatan ini disebabkan oleh kurang baiknya kinerja lembaga pelaksana pengelola ADD dalam menyiapkan administrasi dan pelaporan penggunaan ADD sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sehingga pada tahap berikutnya penyaluran dana PID di ketiga kecamatan tersebut tidak dilakukan. Sebab pemberdayaan masyarakat desa merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengembangkan dirinya. Dalam program ADD yang berhubungan dengan PID, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan, kemauan dan keinginan untuk memberikan ide/gagasannya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Namun realitanya berbeda, dimana pemberdayaan masyarakat desa melalui aspirasi akan program ADD tidak berjalan. Akibat tingkat ketidakpedulian masyarakat desa akan program yang dikerjakan oleh pemerintah semakin tinggi.

Ketidaksiapan administrasi dan pelaporan pada Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai dan Kecamatan Pangean disebabkan oleh kurangnya kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Karena rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa seharusnya dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW dan Ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Padahal program ini mengedepankan pemberdayaan masyarakat,

yang memiliki arti penting mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan kebijakan ADD di Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan ADD di bidang PID lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan bantuan langsung ADD tahap II. Kondisi ini juga didukung oleh kurang baiknya kinerja lembaga pelaksana program ADD yang sudah ditunjuk dan ditetapkan.

Permasalahan lainnya yang ditemukan di Kecamatan Kuantan Tengah yang terdiri dari 26 desa/kelurahan yaitu Bandar Alai, Pulau Kedundung, Pulau Aro, Seberang Taluk, Pulau Baru, Koto Tuo, Kopah, Jaya, Munsalo, Pulau Kopung Sentajo, Kampung Baru Sentajo, Koto Sentajo, Muaro Sentajo, Pulau Komang, Beringin Taluk, Sawah, Pasar Taluk, Koto Taluk, Simpang Tiga, Pulau Godang, Koto Kari, Pintu Gobang, Jake, Seberang Taluk Hilir, Sitorajo dan Sungai Jering. adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya kinerja dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Dimana dalam menyusun kegiatan ADD telah dilakukan Musrenbang tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD.

Melalui usaha pembangunan daerah yang menyentuh keinginan masyarakat diharapkan program-program pembangunan yang dilak-

sanakan mampu menciptakan kemajuan dan pertumbuhan. Di wilayah pedesaan pertumbuhan pembangunan juga sangat diharapkan, karena menurut Wasistiono (2007) desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah penduduk yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan memiliki tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Dimana filosofi terbentuknya suatu desa akibat adanya kesamaan hidup, budaya, homogen, paguyuban (*gameinschaft*) dan adat istiadat dalam suatu wilayah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa melalui ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

## METODE

Pelaksanaan penelitian ini untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama digunakan untuk menggambarkan (*deskriptif*) dan menjelaskan (*explanatory* atau *confirmatory*) tentang fenomena efektivitas pemberdayaan masyarakat desa melalui ADD di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan observasi diharapkan hasil penelitian dapat mengungkapkan bagaimana efektivitas pemberdayaan masyarakat desa melalui ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program ADD

Pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri demi mencapai

tujuan. Dimana dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya dalam upaya mengeluarkan diri dari ketidakberdayaan yang dialaminya. Berdasarkan pada perumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya, maka peneliti memfokuskan penelitian ini berdasarkan teorinya *Nyoman Sumaryadi* yang menjelaskan tentang efektivitas pemberdayaan masyarakat desa melalui program ADD.

### 1. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh ketua pelaksana program ADD sudah cukup baik. Dimana dalam melaksanakan kepemimpinan, ketua program ADD sudah bisa mengkomunikasikan program kepada setiap masyarakat melalui pengumuman, himbuan dan sosialisasi yang dilakukan. Kemampuan komunikasi ini tentunya tidak terlepas dari *intelegency* yang dimiliki oleh ketua program ADD. Karena *intelegency* yang dimiliki oleh pimpinan akan menjadi penentu dalam proses pelaksanaan program yang dikerjakan. Sebab *intelegency* pimpinan yang tidak hanya ditinjau dari pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan saja, namun juga dilihat dari pengalaman yang dimiliki seseorang dalam memimpin. Karena realita yang ada tidak semua ketua pelaksana program ADD yang ada memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sebagai ukuran untuk *intelegency* yang dimiliki. Tetapi ada sebagian ketua program ADD yang memiliki pendidikan rendah, namun bisa melaksanakan program dengan pengalaman yang dimilikinya.

### 2. Inovasi

Inovasi yang dimiliki oleh pengelola program ADD sebenarnya sudah ada, tetapi inovasi yang dilaksanakan masih setengah hati atau ragu-ragu untuk dilaksanakan. Dimana inovasi yang ditunjukkan dalam proses identifikasi permasalahan sudah ada, namun masih takut-takut untuk memberikan ide dan gagasan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Padahal pemecahan masalah yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan program merupakan hak *preogratif* pengelola program untuk menyelesaikannya. Namun akibat dari keterlibatan elit lokal yang

tinggi membuat, setiap inovasi yang ditemukan harus terlebih dahulu mendiskusikan dengan elit lokal yang ada, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Ketidakberanian pengelola program ADD dalam melaksanakan inovasi yang dimilikinya disebabkan oleh ketakutan yang tinggi akan kesalahan terhadap solusi yang ditemukan. Oleh karenanya setiap inovasi yang akan dibicarakan terlebih dahulu terhadap elit lokal untuk kemudian diambil keputusannya. Dalam upaya menumbuhkan inovasi yang dimiliki tentunya membutuhkan data dan informasi yang lengkap, sehingga dari informasi dan data yang lengkap pihak pemberdaya akan memiliki ide dan gagasan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.

### 3. Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program ADD masih rendah, karena pihak pemberdaya masih jarang melakukan sosialisasi terhadap program. Walaupun pihak pemberdayaan telah mengklaim telah melakukan sosialisasi, namun masyarakat hanya mengakuinya diawal-awal saja sosialisasi dilakukan. Proses sosialisasi yang dilakukan cenderung pada mengumpulkan masyarakat dibalai desa atau gedung pertemuan desa untuk memberikan penjelasan tentang program yang akan dilaksanakan. Dalam proses sosialisasi yang dilakukan terkadang tidak semua masyarakat hadir untuk mendengarkan pemaparan program yang akan dilakukan. Akibatnya masih banyak masyarakat yang tidak menerima informasi terhadap pelaksanaan program ADD yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat. Kegagalan dalam proses sosialisasi yang dilakukan akan membuat program ini hanya akan diikuti oleh segelintir masyarakat saja tanpa menyentuh keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu proses sosialisasi yang dilakukan harus berjalan, agar masyarakat keseluruhannya mengetahui program pemberdayaan yang dilaksanakan. Sebab ditakutkan akan muncul indikasi apabila program kurang sosialisasi, masyarakat pemanfaat program akan itu-itu saja dan berasal dari masyarakat yang dekat dengan pusat informasi program.

### 4. Team Work

*Team work* yang dibentuk dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas yang telah dibebankan masih belum maksimal melakukan kinerjanya. Ketidakmasimalan ini juga disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaksana program terhadap pekerjaan yang diberikan. Akibatnya program yang dikerjakan belum dapat dikerjasama secara bersama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Rendahnya kerjasama yang ditunjukkan oleh pihak pemberdaya disebabkan oleh tingkat kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki juga masih rendah. Rata-rata tingkat pendidikan yang menjadi pihak pemberdaya adalah SMU/SMK, realita ini terkadang sering membuat pihak pemberdaya sulit menyatukan idenya agar bisa bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dibebankan. Dampaknya tim kerja yang dibentuk sulit melaksanakan strategi yang telah disusun untuk melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat. Padahal kerjasama yang dilakukan oleh tim kerja akan sangat membantu dalam proses pelaksanaan pemberdayaan. Karena pihak pemberdaya akan saling membantu dan tolong menolong dalam melaksanakan tugas pemberdayaan. Bahkan pihak pemberdaya juga bisa memikirkan bersama apabila menemui hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan.

### 5. Komunikasi

Komunikasi yang dikembangkan oleh pihak pemberdaya program masih belum berjalan dengan baik. Artinya pihak pemberdaya belum dapat memberikan informasi dan berita tentang pelaksanaan program yang jelas. Ketidakmampuan pihak pemberdaya melakukan komunikasi membuat program tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran dalam program ini. Proses komunikasi yang terpenting adalah menyampaikan informasi atau berita akan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Karena dengan adanya kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentunya akan memberikan pengetahuan masyarakat akan program pem-

berdayaan masyarakat diberikan oleh pemerintah daerah. Namun realita dilapangan yang berkembang informasi yang diterima oleh masyarakat akan program pemberdayaan masyarakat masih belum merata keseluruh masyarakat yang cocok jadi kelompok sasaran program. Belum sampainya informasi pelaksanaan program kepada masyarakat umumnya disebabkan kurangnya komunikasi yang dilakukan pihak pengelola program kepada masyarakat desa. Akibatnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat belum dapat diterima merata informasinya oleh masyarakat.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program ADD**

ADD dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian adalah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif. Sedangkan tujuan ADD juga merupakan hasil capaian yang ingin diwujudkan. Untuk meneliti permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program ADD di Kabupaten Kuantan Singingi, penulis mengambil teorinya Lowe sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan.

#### **1. Faktor *Fear***

Masyarakat memang memiliki rasa takut yang cukup beralasan, sehingga tidak peduli terhadap keberadaan program ADD yang dilaksanakan. Walaupun program ini menjanjikan tujuan yang jelas dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat desa melalui bantuan modal bagi kaum perempuan yang memiliki usaha kelompok atau kelompok usaha. Dimana upaya yang dilakukan dengan memberikan bantuan modal kepada kaum perempuan guna membantu kehidupan keluarganya dan mengembangkan ekonomi keluarganya. Namun tidak

semua masyarakat, khususnya kaum perempuan tertarik untuk mengikuti program dan berperan serta dalam program bantuan modal ini. Rasa takut yang paling dominan menghantui masyarakat dalam mengikuti program bantuan modal melalui ADD adalah kegagalan dalam mengikutinya. Sebab gagal dalam melaksanakan program yang diikuti akan membuat masyarakat terbebani dengan hutang yang dibuatnya dengan menerima modal dari program yang diikuti. Karena rasa takut akan gagal sudah muncul didalam diri masyarakat, khususnya kaum perempuan disaat mereka mengikuti program harus menyusun sebuah proposal pengajuan permohonan modal sesuai dengan syarat dan kriteria program yang ditetapkan. Apalagi jiwa kaum perempuan yang menjadi kelompok sasaran adalah kriteria jiwa yang labil dan sulit untuk mengambil keputusan yang mengandung resiko yang tinggi. Oleh karenanya masyarakat memiliki rasa takut yang tinggi untuk gagal dalam mengikuti program yang ditetapkan. Apabila kegagalan benar-benar terjadi maka rasa takut yang berikutnya akan muncul adalah takut menerima sanksi, akibat dari kegagalan yang dilakukan. Sebab sanksi yang diterima bukan hanya sanksi finansial tetapi juga sanksi psikologis dari masyarakat yang gagal mengikuti program.

#### **2. Faktor *Role Clarity***

Masyarakat desa merasa sangat kurang nyaman dengan penetapan kriteria usaha yang bisa menerima bantuan modal melalui program ADD. Sebab ternyata tidak semua masyarakat menggeluti usaha ekonominya yang sesuai dengan kriteria usaha yang sudah ditetapkan oleh program ADD. Sehingga masyarakat harus mengikuti kriteria usaha yang telah ditetapkan untuk memperoleh bantuan modal itu, apabila tidak mengikuti kriteria usaha yang ditetapkan maka masyarakat tidak akan mendapatkan modal usaha yang diberikan melalui program ADD. Kondisi ini membuat banyak masyarakat, khususnya kaum perempuan yang kurang bisa mengikuti program ADD, karena tidak sesuai dengan kriteria usaha yang telah ditetapkan. Realita ini membuktikan bahwa pihak pengelola

program ADD kurang mengenali dan mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat, bisa saja disebabkan oleh kurangnya observasi dan pencarian data dari pengelola program ADD akan usaha pengembangan ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat. Akibat dari ketidakmampuan pengelola program ADD dalam mengenali keinginan masyarakat berdampak kepada ketidaknyamanan masyarakat dalam mengikuti program yang dilaksanakan. Kemudian ketidaknyamanan juga dirasakan masyarakat apabila mereka harus melakoni pekerjaan yang baru dengan merubah pekerjaan yang lama, hanya karena ingin memperoleh program saja.

### 3. Faktor *Resistance of Change*

Organisasi pelaksana program ADD memang cenderung menggunakan metode dan tehnik yang sama untuk melaksanakan program bantuan modal. Bahkan diseluruh wilayah desa yang menerima program ADD di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kriteria dan persyaratan yang sama bagi siapa saja masyarakat, khususnya kaum perempuan untuk mengikuti program. Fakta ini menjelaskan bahwa pihak pengelola program ADD memang kurang melakukan observasi dan pengumpulan data guna mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi lokalnya, terutama dalam menetapkan jenis usaha yang akan menerima bantuan modal usaha. Padahal setiap desa penerima program ADD memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda, keadaan demografi yang berbeda dan kondisi geografis yang berbeda, tentunya membuat penetapan usaha yang dilakukan juga berbeda-beda. Dampaknya masih banyak kriteria usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa belum terakomodir untuk bisa menerima bantuan modal melalui program ADD. Sehingga masyarakat desa yang seharusnya layak menerima bantuan modal dalam mengembangkan ekonominya, menjadi sangat sulit untuk menerima bantuan dikarenakan persyaratan dan kriteria yang tidak terpenuhi.

## SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat melalui program ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan lancar atau kurang efektif. Artinya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program ADD dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan belum dapat termanfaatkan dengan baik. Akhirnya banyak dari program ini yang dialihkan kepada program pembangunan infrastruktur desa. Padahal apabila pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar, akan memberikan kemandirian kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi dan ekonomi lokalnya. faktor yang dominan mempengaruhi efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi, disimpulkan bahwa faktor yang dominan mempengaruhinya adalah faktor ketakutan (*fear*). Dimana ketidakmampuan masyarakat desa, khususnya kaum perempuan untuk mengikuti program ADD yang memberikan bantuan modal usaha disebabkan oleh rasa takut yang tinggi dari masyarakat desa. Rasa takut yang ditimbulkan meliputi ketakutan akan kegagalan dalam mengikuti program, dimana dengan perasaan takut gagal membuat masyarakat tidak akan berkonsentrasi mengerjakan kegiatan usaha yang diikutinya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Kuncoro Mudrajat. 2005. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Paulus Wirutomo dkk., 2003. *Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Cipruy, Jakarta.
- Siagian S.P., 2000. *Adminstrasi Pembangunan*. Bumi Aksara., Jakarta.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Citra Utama, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Penerbit Fokusmedia, Bandung.